

ABSTRAK

Arief Setiawan, 2220010004, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dihubungkan Dengan Teori Harmonisasi Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Tesis Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024*

Perkembangan hukum di Indonesia sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan di masyarakat. Adanya lembaga praperadilan bertujuan untuk menjalankan amanat dan asas yang terkandung dalam KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang utuh. Namun pada praktiknya terdapat tumpang tindih regulasi yang mengatur Praperadilan, terutama mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Kapolri dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan analisis bagaimana implementasi peraturan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan dan hambatannya di wilayah hukum POLDA Jawa Barat, serta harmonisasi peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang awalnya menggunakan data sekunder sebelum melakukan penelitian langsung terhadap data primer di lapangan, data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan di POLDA Jawa Barat menunjukkan komitmen yang kuat dan melakukan langkah proaktif seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan intensif. Adapun hambatannya adalah ketidakseragaman pemahaman dan penafsiran dari para Aparat Penegak Hukum mengenai ruang lingkup dan batasan objek praperadilan. Serta harmonisasi hukum harus dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang APH dalam proses praperadilan seperti merevisi KUHAP yang mengatur secara eksplisit mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, atau membuat aturan yang baru yang dapat menyelaraskan aturan yang saling tumpang tindih mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkannya.

Kata Kunci : *Penetapan Tersangka; Praperadilan; Harmonisasi Hukum.*

ABSTRACT

Arief Setiawan, 2220010004, *Determination of Suspects as Pretrial Objects Connected to the Theory of Legal Harmonization in the West Java Regional Police Law Area. Thesis of Master of Law Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung, 2024*

The development of law in Indonesia is very dynamic and always changes following developments in society. The existence of pretrial institutions aims to carry out the mandate and principles contained in the Criminal Procedure Code which upholds human rights. KUHAP places the suspect or defendant as a human being who has complete dignity. However, in practice, there are overlapping regulations governing pretrial, especially regarding the determination of a person as a suspect in the Criminal Procedure Code, Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, National Police Chief Regulation and Police Criminal Investigation Headquarters Regulation Number 1 of 2022 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for the Implementation of Criminal Investigation.

The purpose of this research is to find out and provide an analysis of how the implementation of the regulation of determining a suspect as an object of pretrial and its obstacles in the West Java POLDA jurisdiction, as well as the harmonization of the regulation of determining a suspect as an object of pretrial.

The research conducted is empirical juridical legal research or field research, namely legal research that initially uses secondary data before conducting direct research on primary data in the field, secondary data by processing data from primary, secondary and tertiary legal materials.

Based on the results of the research, it can be concluded that in the implementation of the regulation on the determination of suspects as pretrial objects at the West Java POLDA shows a strong commitment and takes proactive steps such as conducting socialization and intensive training. The obstacle is the lack of uniformity in the understanding and interpretation of law enforcement officials regarding the scope and limits of pretrial objects. And legal harmonization must be done to minimize the abuse of law enforcement officers' authority in the pretrial process such as revising the Criminal Procedure Code which explicitly regulates the determination of suspects as pretrial objects, or creating new rules that can harmonize overlapping rules regarding the determination of suspects as pretrial objects so as not to cause errors in interpreting them.

Keywords: *Determination of Suspects; Pretrial; Legal Harmonization.*